JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
JOURNAL OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT
JMKP

EVALUASI BELANJA K/L SEBAGAI BEBAN KERJA TAMBAHAN PADA SATKER MITRA KERJA KPPN KEDIRI

Irwan Suliantoro[1], Auxciliadora Monica Deviyani[2]
Politeknik Keuangan Negara STAN
irwans@pknstan.ac.id[1], 4301180548.auxciliadora@gmail.com[2]

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the perception of spending unit (satker) on the benefits of expenditure evaluation, which carried out by satker through the SMART application and the eMonev application. Both applications have the same main objective, which is to provide input in order to support policy making for performance improvement. Both applications are used by the echelon 1 unit and by the regional satker. The problem is that there are differences in the characteristics of application users between the echelon 1 and the regional satker. These differences in characteristics have the potential to cause differences in the benefits of expenditure evaluation felt by the echelon 1 and by the regional satker. To find out how far the benefits felt by the regional satker that are partners of KPPN Kediri, a survey was conducted. From the survey results, it is known that some satkers have a perception that filling in the Monev data on K/L spending is an additional workload and there is less benefit. In order to increase the benefits, it is necessary to differentiate the information needs for the central echelon 1 unit from the regional satker in the SMART and eMonev applications.

Keyword: Expenditure evaluation of line ministry

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi satuan kerja (satker) terhadap manfaat evaluasi belanja K/L. Evaluasi belanja K/L yang dilakukan oleh satker dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja Anggaran (menggunakan aplikasi SMART Ditjen Anggaran) dan eMonev (Bappenas). Kedua aplikasi tersebut mempunyai tujuan utama yang sama, yaitu memberikan masukan dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan untuk peningkatan/perbaikan kinerja. Kedua aplikasi tersebut digunakan oleh unit eselon 1 pusat dan oleh satker daerah. Permasalahan yang muncul yaitu adanya perbedaan karakteristik pengguna aplikasi antara unit eselon 1 pusat dengan satker daerah. Unit eselon 1 pusat merupakan entitas pembuat kebijakan, sedangkan satker daerah merupakan entitas pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh unit eselon 1 pusat. Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan manfaat evaluasi belanja yang dirasakan oleh unit eselon 1 pusat dan oleh satker daerah. Untuk mengetahui seberapa jauh manfaat yang dirasakan oleh satker daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Kediri, dilakukan survei. Dari hasil survei, diketahui bahwa sebagian satker mempunyai persepsi bahwa pengisian data Monev belanja K/L sebagai beban kerja tambahan dan tidak/kurang dirasakan manfaatnya. Untuk meningkatkan persepsi manfaat Monev belanja K/L, maka perlu dibedakan kebutuhan informasi untuk unit eselon 1 pusat dengan satker daerah pada aplikasi SMART dan eMonev.

Kata Kunci: Evaluasi Belanja K/L

KLASIFIKASI JEL:

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) setiap tahun dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). RKAKL merupakan dokumen yang berisi rencana kinerja dan rencana anggaran tahunan dari K/L. RKAKL disusun melalui tiga pendekatan, yaitu Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu, dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Khusus mengenai PBK, agar penerapannya dapat dioperasionalkan, diperlukan tiga instrumen dalam implementasi PBK, yaitu: indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.

Terkait evaluasi kinerja belanja K/L (yang tercantum pada dokumen RKAKL), terdapat beberapa sistem dalam mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) belanja K/L, yaitu Monev Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Ditjen Perbendaharaan, *Spending Review* dari Ditjen Perbendaharaan, Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Ditjen Anggaran, dan eMonev dari Bappenas. Selain keempat sistem tersebut, terdapat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). SAKIP menghasilkan dokumen berupa Laporan Kinerja. Untuk Monev IKPA, *Spending Review*, Evaluasi Kinerja Anggaran, dan eMonev, fokus Monev-nya mengacu pada belanja K/L (bersumber dari APBN), sedangkan SAKIP mencakup belanja yang bersumber dari APBN dan APBD.

Dari beberapa sistem Monev di atas, yang terkait dengan evaluasi perencanaan anggaran yaitu *Spending Review*, EKA, LAKIN, dan eMonev, sedangkan IKPA lebih fokus kepada pelaksanaan anggaran. Terkait *Spending Review*, pelaksanaan Monev-nya hanya khusus dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan, tidak oleh K/L ataupun satuan kerja (satker). Selanjutnya terkait dengan LAKIN, pelaksanaan Monev-nya dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem aplikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, objek pembahasan pada artikel ini terkait dengan Monev berupa Evaluasi Kinerja Anggaran dan eMonev.

Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Hasil evaluasi kinerja ini menjadi acuan untuk 1) Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; 2) Penyusunan reviu angka dasar; 3) Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya; 4) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi. Implementasi terhadap Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

EMonev merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan yang diinisiasi oleh Bappenas. Aplikasi eMonev bertujuan untuk mengumpulkan data realisasi pelaksanaan (realisasi anggaran dan realisasi *output*) secara lengkap, sehingga dapat dijadikan bahan analisis dan menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perlaksanaan rencana pembangunan. Aplikasi eMonev berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satker sebagai ujung tombak penyedia data realisasi.

Dari uraian di atas, pada intinya, Evaluasi Kinerja Anggaran dan eMonev sama-sama mempunyai tujuan memberikan masukan (*feed back*) dalam rangka mendukung pengambilan/perumusan kebijakan (Rubio, 2011). Manfaat berupa *feed back* tersebut berlaku tidak hanya bagi unit eselon 1 pusat, tetapi juga berlaku bagi seluruh satker pada unit eselon 1 yang bersangkutan. Untuk mengetahui persepsi manfaat Monev pada level satker, maka dilakukan survei terhadap satker-satker yang menerima alokasi belanja dari K/L. Dalam

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

konteks ini, satker-satker yang disurvei merupakan mitra kerja dari KPPN Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu :

1. Apa manfaat Monev belanja K/L?
2. Apakah satker (sebagai mitra kerja KPPN Kediri) merasakan manfat dari Monev Belanja K/L?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang dicapai yaitu :

1. Mengetahui manfaat Monev belanja K/L.
2. Mengetahui persepsi satker (mitra kerja KPPN Kediri) terhadap manfaat Monev belanja K/L.

1.4 Permasalahan

Terdapat beberapa sistem Monev belanja K/L. Dari sistem Monev yang ada, Evaluasi Kinerja Anggaran (melalui aplikasi SMART) dan eMonev merupakan evaluasi belanja K/L berbasis aplikasi komputer yang dilakukan oleh satker. Satker-satker yang menggunakan kedua aplikasi tersebut melakukan perekaman data terkait capaian kinerja. Diharapkan, dengan data dan sistem yang tersedia, satker dapat melakukan evaluasi kinerja dalam rangka pengendalian dan perbaikan kinerja sehingga belanja K/L dapat terserap secara efisien dan optimal.

Hasil dari evaluasi digunakan sebagai masukan (*feedback*) bagi unit eselon 1 pusat dan satker di daerah dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan untuk peningkatan/perbaikan kinerja. Namun demikian, dampak dari *feedback* tersebut dapat dirasakan berbeda antara unit eselon 1 pusat dengan satker di daerah. Satker daerah bukan entitas pembuat kebijakan, namun merupakan entitas pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh unit eselon 1 pusat. Dengan demikian, manfaat berupa *feedback* dari Monev belanja K/L tidak secara maksimal dirasakan oleh satker-satker di daerah. Untuk memastikan hal ini, dilakukan survei mengenai persepsi manfaat Monev terhadap satker-satker yang menerima belanja K/L, khususnya satker-satker yang menjadi mitra kerja dari KPPN Kediri.

1.5 Reviu Pustaka

Duplikasi Sistem Monev Belanja K/L

Dari sisi *literature review*, gambaran mengenai Monev belanja K/L tercermin pada artikel yang berjudul "Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga" (Suliantoro, 2020). Terdapat beberapa sistem (aplikasi) Monev belanja K/L, yaitu : Reviu Pelaksanaan Anggaran (Ditjen Perbendaharaan), *Spending Review* (Ditjen Perbendaharaan), Evaluasi Kinerja Anggaran (Ditjen Anggaran), dan eMonev (Bappenas). Dari keempat sistem (aplikasi) tersebut, yang digunakan oleh satker yaitu Reviu Pelaksanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran, dan eMonev. Terkait penggunaan beberapa sistem aplikasi Monev belanja K/L yang digunakan oleh satker, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian.

- Terdapat duplikasi sistem terkait monev anggaran/belanja K/L yang secara fungsi mempunyai kemiripan/kesamaan. Satker harus mengisi/merekam berbagai macam data yang sebagian karakteristik datanya mempunyai kemiripan, antara lain: merekam capaian *output*, merekam capaian indikator *output*, merekam permasalahan/ kendala yang dihadapi satker dalam proses pencapaian *output*. Satker harus mengisi/ merekam berbagai macam data yang sebagian karakteristik datanya mempunyai kemiripan. Dalam batas-batas tertentu, hal ini menimbulkan duplikasi pekerjaan. Dengan demikian, satker melakukan 2 atau 3 kali pekerjaan untuk hal yang hampir mirip. Dari sisi birokrasi, hal ini menjadi tidak efisien dan membebani satker.
- Pada aplikasi eMonev, satker diharuskan merekam capain/realisasi fisik pada level *output*, komponen, indikator *output*, indikator kegiatan (komponen merupakan tahapan dalam pencapaian *output*). Selain itu, satker juga harus merekam realisasi

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

anggaran pada level komponen per-jenis belanja. Secara teknis, satker kesulitan dalam mengisi data capaian kinerja dan realisasi anggaran pada level komponen. Satker harus melakukan penghitungan data secara manual sebelum melakukan input pada aplikasi eMonev.

- Pada aplikasi eMonev, variasi data yang direkam oleh satker relatif cukup banyak (dibanding aplikasi Monev pada Ditjen Perbedaharaan dan Ditjen Anggaran). Aplikasi eMonev adalah aplikasi yang digunakan pada ranah perencanaan pembangunan. Namun, substansinya relatif masuk ke ranah penganggaran.
- Terkait variabel Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Evaluasi Kinerja Anggaran, perlu menjadi pertimbangan bahwa RPD merupakan ranah dari sisi administrasi pelaksanaan belanja. RPD tidak berada pada ranah *output*, *outcome*, atau indikator *output*/*outcome*. Variabel RPD sudah digunakan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai variabel pada Reviu Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian, menjadi kurang tepat memposisikan variabel pelaksanaan anggaran ke dalam variabel kinerja anggaran.
- Terkait *Spending Review* (berupa Reviu Alokasi) yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan, mekanisme kerjanya sama/mirip dengan penelaahan RKAKL yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran. RKAKL yang sudah ditelaah oleh Ditjen Anggaran pada saat proses perencanaan anggaran, pada Januari atau Februari tahun berikutnya, ditelaah atau di-*review* ulang oleh Ditjen Perbendaharaan. Hal ini menimbulkan duplikasi pekerjaan antara Ditjen Anggaran dengan Ditjen Perbendaharaan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Reviu Pelaksanaan Anggaran, *Spending Review*, Evaluasi Kinerja Anggaran, dan eMonev pada umumnya mempunyai beberapa persamaan yaitu :

- Bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan.
- Menggunakan variabel pengukuran berupa target *output* (keluaran), capaian *output*, pagu anggaran, realisasi anggaran.
- Menjadikan satker sebagai subjek atau aktor pelaksana dengan aktivitas berupa perekaman capaian *output* dan identifikasi permasalahan yang dihadapi satker.
- Objeknya berupa belanja K/L.
- Dilakukan secara rutin (setiap bulan).

2. Reviu Pelaksanaan Anggaran, *Spending Review*, Evaluasi Kinerja Anggaran, dan eMonev mempunyai perbedaan yaitu :

- Reviu Pelaksanaan Anggaran menggunakan variabel yang digunakan untuk menghitung IKPA.
- *Spending Review* tidak melibatkan satker dan hanya dilaksanakan pada awal tahun.
- Data realisasi/capaian kinerja pada eMonev tidak terintegrasi dengan sistem di Kementerian Keuangan.
- Evaluasi Kinerja Anggaran dijadikan sebagai dasar penentuan pemberian insentif kepada K/L.

3. Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit eselon 1 dan satker yaitu:

- Pada eMonev Bappenas, secara teknis, satker mengalami kesulitan dalam mengisi data capaian kinerja dan realisasi anggaran pada level komponen. Satker harus melakukan penghitungan data secara manual sebelum melakukan input pada aplikasi eMonev.
- Pada aplikasi eMonev, variasi data yang direkam oleh satker relatif cukup banyak (dibanding aplikasi Monev pada Ditjen Perbedaharaan dan Ditjen Anggaran). Aplikasi eMonev adalah aplikasi yang digunakan pada ranah perencanaan pembangunan. Namun, substansinya relatif masuk ke ranah penganggaran.
- Pada Evaluasi Kinerja Anggaran (yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran), RPD merupakan indikator yang terkait dengan administrasi pelaksanaan belanja. RPD tidak berada pada ranah *output*, *outcome*, atau indikator *output*/*outcome*. Variabel RPD sudah digunakan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai variabel pada Reviu Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian, menjadi kurang tepat

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

memposisikan variabel pelaksanaan anggaran ke dalam variabel kinerja anggaran.

Kesuksesan Penerapan Sistem Aplikasi

Tingkat manfaat suatu aplikasi dapat diukur melalui *Model for Mandatory Use of Software Technologies* (MMUST) yang dikembangkan oleh Chang E. Koh dkk. MMUST merupakan sebuah model untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan sistem informasi pada aplikasi yang penggunaannya bersifat wajib (*mandatory*) dengan memperhatikan variabel *information quality*, *information satisfaction*, *performance expectancy*, *social influence*, *attitude*, *use*, dan *overall satisfaction*, dimana variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi *net benefits*.

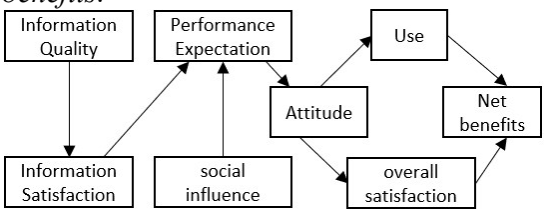

Gambar 1. MMUST (sumber : Koh *et al*, 2010)

Information Quality menunjukkan sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. *Information Satisfaction* menunjukkan bahwa pengguna dapat merasakan manfaat dari informasi yang dihasilkan oleh sistem aplikasi yaitu berguna untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. *Performance Expectancy* merupakan tingkat kepercayaan dari pengguna terhadap penggunaan aplikasi yang akan memberi manfaat dalam melakukan aktifitas tertentu. *Social Influence* merupakan tingkat dimana pengguna merasa yakin dan percaya untuk menggunakan aplikasi tertentu. *Attitude* merupakan perasaan positif atau negatif seorang pengguna aplikasi tentang bagaimana berperilaku pada suatu sasaran. *Use* merupakan frekuensi dan intensitas dalam menggunakan sistem. *Overall Satisfaction* mengacu kepada kepuasan yang didapatkan oleh pengguna yang dapat menyikapi penggunaan dari sebuah sistem aplikasi secara positif. *Net Benefits* merupakan dampak yang dihasilkan oleh keberhasilan sistem aplikasi, seperti penghematan biaya, perluasan pasar, dan penghematan waktu (Santoso *et al*, 2017).

Dari gambar 1 di atas, penelitian dengan menggunakan MMUST mempunyai beberapa hipotesis yaitu : H1 : *Information Quality* mempengaruhi *Information Satisfaction*; H2 : *Information Satisfaction* mempengaruhi *Performance Expectancy* (PE); H3 : *Performance Expectancy* mempengaruhi *Attitude*; H4 : *Social Influence* mempengaruhi *Performance Expectancy*; H5 : *Attitude* mempengaruhi *Use*; H6 : *Attitude* mempengaruhi *Overall Satisfaction*; H7 : *Use* mempengaruhi *Net Benefits*; H8 : *Overall Satisfaction* mempengaruhi *Net Benefits*.

Untuk menguji hipotesis di atas, dilakukan pengambilan data melalui survei. Pada survei tersebut disertakan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan 8 variabel di atas. Pernyataan-pernyataan pada kuesioner digunakan untuk mengukur setiap variabel berdasarkan skala likert 5 poin atau 6 poin tergantung kebutuhan. Skala 5 poin misalnya yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Skala 6 poin diambil untuk menghindari kecenderungan responden memilih angka tengah. Skalanya yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) agak tidak setuju, (4) agak setuju, (5) setuju, dan (6) sangat setuju. Hasil survei kemudian diolah secara kuantitatif.

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi satker terhadap manfaat Monev belanja K/L. Bila dikaitkan dengan 8 variabel pada MMUST, maka aspek persepsi manfaat pada Monev belanja K/L lebih terkait dengan variabel *Net Benefits*. Pada variabel *Net Benefits* terdapat 6 indikator yang diukur, yaitu :

- Aplikasi memberikan keunggulan bisnis yang kompetitif.
- Aplikasi dapat menyediakan peningkatan hubungan satker (*client*).

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

- Secara keseluruhan aplikasi ini hemat biaya.
- Aplikasi memberi peningkatan citra unit/ lembaga.
- Aplikasi menyediakan peningkatan layanan kepada satker.
- Aplikasi mengikuti kebutuhan/mekanisme kerja K/L ataupun unit organisasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menyajikan gambaran suatu fenomena tentang apa yang dialami objek penelitian dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Menurut Sugiyono, metode kualitatif digunakan ketika masalah belum jelas dimana metode ini bertujuan untuk memahami makna dibalik data yang tampak untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Sugiyono, 2019). Objek penelitian ini adalah evaluasi belanja K/L pada aplikasi SMART dan eMonev.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif berupa hasil kuesioner, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa respon tertulis dari responden atas pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk kuesioner. Data tersebut berupa opini atau pengalaman dari satker-satker yang menjadi mitra kerja KPPN Kediri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, peraturan terkait perencanaan dan penganggaran, karya ilmiah, dan dokumen resmi dari instansi pemerintah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi kepustakaan, dan penyebaran kuesioner. Observasi dilakukan terhadap proses bisnis Monev belanja K/L termasuk penggunaan *tools* yang berupa aplikasi SMART dan eMonev. Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti dokumen tertulis dan buku-buku pustaka. Penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021. Kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu kuesioner terkait aplikasi SMART dan kuesioner terkait aplikasi eMonev. Masing-masing kuesioner terdiri atas 8 pertanyaan dengan jawaban “ya/tidak” dan 2 pertanyaan dengan jawaban berupa opini. Proses pengisian kuesioner dilakukan secara *online*. Dari sejumlah kuesioner yang disebar, terdapat 51 satker yang memberikan respon. Berikut kuesioner terkait aplikasi SMART:

- Apakah pada satker Bapak/Ibu menggunakan aplikasi SMART dari Ditjen Anggaran Kemenkeu?
- Apabila tidak menggunakan aplikasi SMART, dapatkah Bapak/Ibu memberikan apa alasannya?
- Apabila menggunakan aplikasi SMART, apakah satker Bapak/Ibu merekam data SMART secara rutin?
- Apakah perekaman data SMART menjadi IKU satker?
- Apakah perekaman data aplikasi SMART menambah beban pekerjaan bagi satker?
- Dari sisi aspek pemantauan, apakah satker Bapak/Ibu merasakan manfaat terhadap data SMART yang diinput ?
- Dari sisi aspek evaluasi, apakah satker Bapak/Ibu merasakan manfaat terhadap data SMART yang diinput?
- Dari sisi aspek pengendalian, apakah satker Bapak/Ibu merasakan manfaat terhadap data SMART yang diinput?
- Menurut Bapak/Ibu, terkait pihak yang paling banyak menerima manfaat dari perekaman data SMART, apakah unit eselon I pusat lebih banyak menerima manfaat dibanding satker Bapak/Ibu?
- Apa saran Bapak/Ibu terhadap penggunaan/ perekaman aplikasi SMART dari Ditjen Anggaran?

Adapun kuesioner terkait aplikasi eMonev sebagai berikut :

- Apakah pada satuan kerja Bapak/Ibu menggunakan aplikasi eMonev dari Bappenas?
- Apabila tidak menggunakan aplikasi eMonev, dapatkah Bapak/Ibu memberikan apa alasannya?

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

- Apabila menggunakan aplikasi eMonev, apakah satker Bapak/Ibu merekam data eMonev Bappenas secara rutin?
- Apakah perekaman data aplikasi eMonev (Bappenas) menjadi IKU satker?
- Apakah perekaman data eMonev (Bappenas) menambah beban pekerjaan bagi satker?
- Dari sisi aspek pemantauan, apakah satker Bapak/Ibu merasakan manfaat terhadap data eMonev (Bappenas) yang diinput?
- Dari sisi aspek evaluasi, apakah satker Bapak/Ibu merasakan manfaat terhadap data eMonev (Bappenas) yang diinput?
- Dari·sisi aspek pengendalian, apakah satker Bapak/Ibu merasakan manfaat terhadap data eMonev (Bappenas) yang diinput?
- Menurut Bapak/Ibu, terkait pihak yang paling banyak menerima manfaat dari perekaman data eMonev (Bappenas), apakah unit eselon 1 pusat lebih banyak menerima manfaat dibanding satker Bapak/Ibu?
- Apa saran Bapak/Ibu terhadap penggunaan/ perekaman aplikasi eMonev (Bappenas)?

Selanjutnya, garis besar alur logika (kerangka pemikiran) penelitian ini dituangkan pada diagram sebagaimana tampak pada gambar 2. Evaluasi terhadap belanja K/L yang dilakukan oleh satker dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja Anggaran (Ditjen Anggaran) dan eMonev (Bappenas). Mekanisme Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan dengan aplikasi SMART. Proses input data dilakukan secara rutin setiap bulan. Data yang diinput terkait target dan realisasi anggaran serta capaian *output*-nya.

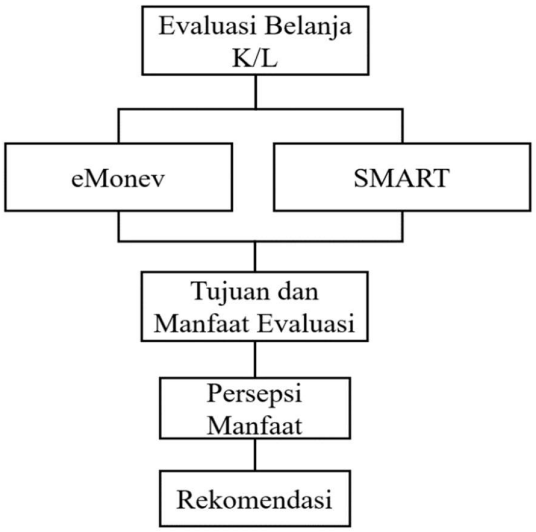

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Kedua aplikasi tersebut mempunyai tujuan utama yang sama, yaitu memberikan masukan (*feed back*) dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan untuk peningkatan / perbaikan kinerja. Kedua aplikasi tersebut digunakan oleh unit eselon 1 pusat dan oleh satker daerah. Dengan demikian, seyogyanya, manfaat berupa *feed back* tersebut berlaku baik untuk unit eselon 1 pusat maupun untuk seluruh satker yang menerima alokasi belanja dari K/L (APBN).

Namun demikian, terdapat perbedaan karakteristik pada unit eselon 1 pusat dengan satker daerah. Unit eselon 1 pusat merupakan entitas pembuat kebijakan, sedangkan satker daerah merupakan entitas pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh pusat. Menurut Keith Mackay, sistem Monev dapat memberikan informasi unik tentang kinerja kebijakan/program/proyek pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah (Mackay, 2010). Dengan perbedaan karakteristik tersebut, maka perlu ditinjau bagaimana persepsi satker terhadap manfaat Monev belanja K/L tersebut.

Untuk memastikan hal tersebut, dilakukan survei mengenai persepsi manfaat Monev terhadap satker-satker yang menerima belanja K/L, apakah penggunaan aplikasi SMART dan aplikasi eMonev cukup bermanfaat dalam mendukung kebijakan pada tingkat satker. Kebijakan satker yang dimaksud dikaitkan dengan aspek

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

pengendalian, aspek pemantauan, dan aspek evaluasi dari kegiatan atau *output* yang dilaksanakan oleh satker. Pengendalian merupakan serangkaian aktivitas manajemen yang ditujukan untuk menjamin agar program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang (akan) timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi merupakan rangkaian aktivitas yang membandingkan realisasi input, *output*, dan *outcome* terhadap rencana dan standar (PP 39/2006).

Aspek pengendalian, aspek pemantauan, dan aspek evaluasi di atas menjadi bagian dari pertanyaan pada survei. Dari hasil survei tersebut kemudian disusun beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan agar Monev belanja K/L dapat lebih dirasakan manfatnya oleh semua pemangku kepentingan, termasuk satker daerah.

Adanya manfaat yang secara maksimal diterima oleh satker akan meningkatkan kepuasan dan keberhasilan implementasi Monev. Menurut Mackay, terdapat tiga hal yang menentukan keberhasilan implementasi Monev, yaitu:

- Pemanfaatan hasil Monev secara intensif pada satu atau lebih tahapan siklus kebijakan.
- Kualitas informasi yang dapat diandalkan.
- Adanya keberlanjutan sistem Monev tanpa terpengaruh oleh perubahan administrasi/ pengambil kebijakan.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Kinerja Anggaran

Proses evaluasi melibatkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengkuantifikasi kinerja. Salah satu tujuan pengukuran kinerja yaitu untuk menjadikan capaian masa lalu sebagai acuan atau dasar (atau rekomendasi) bagi penyusunan/penentuan target kinerja yang akan datang (Meyer, 2002). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran bertujuan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran (berdasarkan capaian kinerja tahun lalu dan target kinerja yang akan ditetapkan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan salah satu instrumen implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran, diperlukan sinergi antara Ditjen Anggaran, K/L, dan pihak-pihak lain (akademisi, pakar, dan praktisi). Aktivitas pada proses evaluasi (kinerja anggaran) mencakup pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja.

Evaluasi kinerja merupakan instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Evaluasi kinerja tersebut mempunyai tujuan 1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari anggaran pemerintah; 2) sebagai *early warning* capaian kinerja anggaran tahun berjalan; 3) sebagai *feedback* anggaran pada tahun mendatang, bahwa proses perencanaan anggaran pemerintah diajukan menggunakan hasil Monev; 4) sebagai bahan pertimbangan penetapan/ kebijakan alokasi anggaran, dan penyusunan RKAKL. Adapun dari sisi fungsi, Evaluasi Kinerja Anggaran paling tidak memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi akuntabilitas, fungsi peningkatan kualitas, dan fungsi *rewarding*. Fungsi akuntabilitas menunjukkan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan untuk membuktikan dan sekaligus mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Fungsi

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

peningkatan kualitas menenjukkan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAKL dalam rangka peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan, khususnya kebijakan alokasi anggaran. Fungsi *rewarding* mengandung arti bahwa hasil evaluasi kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk pemberian penghargaan atau insentif kepada K/L.

Secara garis besarnya, Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri atas EKA Reguler dan EKA nonReguler. EKA Reguler merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menkeu atau menteri/pimpinan lembaga/ pimpinan unit eselon I/pimpinan satker yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 kali dalam satu tahun yaitu evaluasi tahun anggaran berjalan dan evaluasi tahun anggaran sebelumnya. EKA nonReguler merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan (Ditjen Anggaran) sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu.

EKA Reguler dilaksanakan pada tingkat K/L, tingkat eselon I/program, dan tingkat satker/kegiatan. Secara lebih spesifik, berdasarkan objek dan variabel pengukurannya, EKA Reguler terdiri atas EKA atas aspek Implementasi, EKA atas aspek Manfaat, dan EKA atas aspek Konteks. EKA atas aspek Implementasi merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja terkait penggunaan anggaran dan capaian *output*-nya. EKA aspek Implementasi dilaksanakan pada tingkat eselon I/program dan tingkat satker, dengan variabel yang diukur berupa capaian *output*, realisasi atau penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap rencana penarikan dana. EKA atas aspek Manfaat merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi pada pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program K/L. EKA aspek Manfaat dilaksanakan pada tingkat K/L dan eselon I/program, dengan variabel yang diukur berupa capaian Sasaran Strategis K/L dan capaian Sasaran Program unit eselon I/program.

Agar lebih sistematis, EKA aspek Implementasi dan aspek Manfaat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- Persiapan;
- Pengumpulan data;
- Pengukuran dan penilaian;
- Analisis;
- Penyusunan rekomendasi;
- Pelaporan.

EKA atas aspek Konteks merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKAKL termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan pemerintah. EKA aspek Konteks dilaksanakan pada tingkat K/L dan eselon I. Adapun kualitas informasi kinerja yang dievaluasi meliputi :

- Ketersediaan rumusan informasi kinerja;
- Ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
- Kejelasan rumusan informasi kinerja;
- Relevansi/keterkaitan rumusan informasi kinerja dengan sasaran strategis, sasaran program, *output* program, *output* kegiatan, indikator *output*, dan relevansi terhadap Tugas Fungsi organisasi;
- Relevansi/keterkaitan rumusan informasi kinerja dengan dinamika kebijakan pemerintah;
- Kemampuan indikator untuk dapat diukur secara tahunan.

Selain EKA Reguler, terdapat EKA nonReguler. EKA nonReguler merupakan evaluasi atas tahun anggaran berjalan dan atau tahun anggaran sebelumnya yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu. Tujuan dari EKA nonReguler yaitu untuk memberikan pertimbangan terkait penyusunan kebijakan penganggaran dan atau kebijakan yang bersifat insidentil di bidang penganggaran. Data dan hasil EKA Reguler dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan EKA nonReguler.

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

Variabel yang dievaluasi pada EKA kemudian diukur dengan menggunakan beberapa formula. Hasil perhitungan dari beberapa formula kemudian dikompilasi/ diperhitungkan dengan bobot tertentu sedemikian hingga diperoleh nilai kinerja. Hasil pengukuran dibedakan atas aspek Implementasi dan aspek Manfaat. Pengukuran aspek Implementasi menghasilkan Nilai Kinerja aspek Implementasi (NKI), sedangkan pengukuran aspek Manfaat menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA), dimana NKA tersebut juga sudah memperhitungkan NKI. Hasil Nilai Kinerja Anggaran tersebut dibedakan atas tingkat K/L, eselon 1, dan nilai kinerja pada tingkat satker. Nilai kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu :

- di atas 90 = Sangat Baik
- 81 s.d. 90 = Baik
- 61 s.d. 80 = Cukup
- 51 s.d. 60 = Kurang
- 50 kebawah = Sangat Kurang.

Secara lebih spesifik, hasil EKA Reguler dapat digunakan oleh Ditjen Anggaran, K/L, Unit Eselon I, satker sebagai dasar untuk 1) pengambilan kebijakan realokasi / penghematan; 2) pengambilan kebijakan revisi target kinerja; 3) penentuan langkah-langkah strategis dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja; dan 4) penentuan langkah-langkah strategis dalam rangka memperkuat faktor-faktor yang mendukung pencapaian target kinerja.

3.2 EMonev

EMonev merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan yang diinisiasi oleh Bappenas. Aplikasi eMonev bertujuan untuk mengumpulkan data realisasi pelaksanaan (realisasi anggaran dan realisasi *output*) secara lengkap, sehingga dapat dijadikan bahan analisis dan menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perlaksanaan rencana pembangunan. Aplikasi eMonev berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satker sebagai ujung tombak penyedia data realisasi.

Data yang menjadi objek eMonev adalah data RKAKL. Pengguna aplikasi eMonev yaitu Bappenas, K/L, unit eselon 1, pemerintah daerah / organisasi perangkat daerah (OPD), dan satker yang menerima dana (DIPA) dari APBN. Aplikasi eMonev tidak mempunyai *scoring* dalam penilaian kinerja anggaran atau kinerja *output* sebagaimana aplikasi SMART atau sebagaimana hasil Laporan Kinerja (LAKIN). Aplikasi eMonev berbasis *web* dimana satker diminta untuk mengisi data antara lain terkait realisasi anggaran dan capaian *output* pada setiap bulan.

Data yang diinput pada eMonev Bappenas mencakup data *output*, indikator *output*, dan komponen. Data terkait *output* meliputi capaian *output*, realisasi anggaran, permasalahan dan status pelaksanaan *output*. Data terkait indikator *output* berupa capaian indikator *output*. Data terkait komponen meliputi capaian komponen, realisasi anggaran, permasalahan dan status pelaksanaan komponen. Status pelaksanaan menunjukkan kemajuan atau perkembangan pelaksanaan atau pencapaian komponen, *output*, dan indikator *output*. Terdapat 5 kategori status pelaksanaan, yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, selesai, dan dimanfaatkan.

Permasalahan dalam pelaksanaan *output* dan komponen merupakan hal yang perlu diberikan solusinya sekaligus menjadi catatan/masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan mendatang. Terdapat 10 kategori permasalahan yang dapat dipilih dan melengkapinya dengan keterangan, yaitu : anggaran, barang/material, lokasi, desain/ perencanaan/konsep, *stakeholder*, penerima manfaat, waktu, cara/metode pelaksanaan, aparatur pemerintah, persepsi/pengendalian. Beberapa rincian permasalahan terkait kategori anggaran misalnya anggaran kurang, salah dalam penyusunan alokasi, anggaran lebih dari kebutuhan, komponen ada yang tidak dianggarkan. Beberapa rincian permasalahan terkait kategori lokasi misalnya waktu pelaksanaan kurang, waktu

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

untuk proses pengadaan sangat singkat, waktu pengurusan SP2D tidak sesuai dengan target waktu pemenuhan barang/jasa. Beberapa rincian permasalahan terkait kategori desain/konsep misalnya desain/ rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, *Term of Reference*/pedoman/juknis tidak ada atau sedang direvisi atau terlambat terbit, desain tidak sesuai dengan *output* yang diharapkan. (Suliantoro, 2020).

3.3 Persamaan dan Perbedaan

Dari deskripsi di atas, dapat dipetakan perbedaan antara aplikasi SMART dengan aplikasi eMonev sebagaimana terlihat pada tabel 1. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 4 persamaan pokok antara aplikasi SMART dengan aplikasi eMonev. Pertama terkait dengan kesamaan tujuan, yaitu memberikan *feedback* terkait pelaksanaan belanja K/L yang tertuang pada dokumen RKAKL. Kedua terkait variabel yang diukur, yaitu target *output*, capaian *output*, pagu anggaran, realisasi anggaran. Persamaan ketiga, kedua aplikasi digunakan oleh seluruh satker yang menerima DIPA dari APBN. Persamaan yang keempat yaitu adanya rutinitas dari satker untuk menggunakan kedua aplikasi tersebut pada setiap bulannya. Rutinitas tersebut merupakan bagian dari monitoring penggunaan input-input yang dilakukan secara terus menerus dan merupakan bagian penting dari praktik manajemem yang baik (Casley & Kumar, 1987).

Tabel 1. Perbedaan & Persamaan SMART - eMonev

SMART	eMonev
Tujuan : -Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan penganggaran -Dasar penentuan pemberian insentif	Tujuan : Mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
Variabel : - Target volume indikator *output* program - Capaian indikator *output* program - Target volume *output* kegiatan - Capaian *output* kegiatan - Target volume indikator *output* kegiatan - Capaian indikator *output* kegiatan - Pagu anggaran *output* - Realisasi anggaran *output* - Rencana Penarikan Dana - Target indikator Sasaran Strategis - Capaian indikator Sasaran Strategis - Target indikator Sasaran Program - Capaian indikator Sasaran Program - Permasalahan (faktor penghambat/pendukung pencapaian *output*)	Variabel : - Pagu anggaran *output* - Realisasi anggaran *output* - Target volume *output* - Capaian *output* - Pagu anggaran Komponen - Realisasi anggaran Komponen - Target Komponen - Capaian Komponen - Target indikator *output* - Capaian indikator *output* - Permasalahan (terkait anggaran, material, lokasi, desain, *stakeholder*, penerima manfaat, waktu, dsb) - Status pelaksanaan (berupa perencanaan, persiapan, pelaksanaan, selesai, dan dimanfaatkan)
Subjek/Aktor : - Ditjen Anggaran - K/L, satker	Subjek/Aktor : - Bappenas - K/L, satker - Pemda/OPD
Objek : Belanja K/L	Objek : Belanja K/L
Aktivitas satker : - Mengkonfirmasi atau melakukan koreksi capaian *output* setiap bulan - Merekam capaian indikator *output* setiap semester - Merekam faktor penghambat, faktor pendukung, dan rekomendasi (kualitas) capaian *output*	Aktivitas satker -Merekam capaian/ realisasi fisik pada level *output*, komponen, indikator *output*, indikator kegiatan -Merekam realisasi anggaran pada level komponen perjenis belanja - Mengisi (kategori) permasalahan pada level kompoen dan *output*
Waktu pelaksanaan : - Setiap bulan	Waktu pelaksanaan : - Setiap bulan
Output laporan : - Nilai efisiensi - Nilai kinerja	*Output* laporan : - Realisasi anggaran -Capaian *output*

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat 2 perbedaan pokok antara aplikasi SMART dengan aplikasi eMonev. Pertama, jumlah atau variasi jenis data yang direkam oleh satker pada aplikasi SMART lebih sedikit dibanding jumlah jenis data yang direkam pada aplikasi eMonev. Hal ini karena sebagian data pada SMART sudah

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

diambil dari *database* Kementerian Keuangan. Data realisasi anggaran, diambil dari *database* Online Monitoring – Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang menyimpan data transaksi keuangan (realisasi belanja) dari seluruh satker yang menerima dana APBN. Adapun capaian *output* diperoleh dari hasil rekonsiliasi data antara KPPN dengan satker, dimana data rekonsiliasi tersebut juga tersimpan pada *database* OM-SPAN. Kedua, pada aplikasi eMonev tidak ada proses penilaian atau pemberian *scoring* terhadap kinerja yang dicapai satker.

3.4 Hasil Penelitian

Objek survei pada artikel ini terkait dengan penggunaan aplikasi SMART dan eMonev yang digunakan oleh satker. Survei dilakukan untuk mengetahui persepsi satker-satker, apakah penggunaan aplikasi SMART dan eMonev cukup bermanfaat dalam mendukung kebijakan pada tingkat satker. Kebijakan satker yang dimaksud dikaitkan dengan aspek pengendalian, aspek pemantauan, dan aspek evaluasi dari kegiatan/*output* yang dilaksanakan satker.

Survei dilakukan terhadap 51 satker mitra kerja KPPN Kediri yang dilaksanakan dari tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara *online*. Pertanyaan pada kuesioner terdiri atas 2 bagian, yaitu kuesioner terhadap aplikasi eMonev dan kuesioner terhadap aplikasi SMART. Masing-masing kuesioner terdiri dari 8 pertanyaan dengan pilihan jawaban "Ya" dan "Tidak". Satker juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, alasan dan saran mengenai penggunaan kedua aplikasi tersebut.

Jawaban Kuesioner aplikasi eMonev

Dari 51 satker yg memberikan respon, diperoleh data kuantatif sebagai berikut :

- Jumlah satker yang menggunakan aplikasi eMonev yaitu 49 satker (96,08%). Dua satker tidak menggunakan aplikasi eMonev karena belum ada instruksi dari pimpinan.
- Jumlah satker yang mengisi data secara rutin pada eMonev yaitu 47 satker (92%).
- Jumlah satker yang menjadikan pengisian data pada eMonev sebagai IKU organisasi yaitu 38 satker (74,5%), 13 satker tidak menjadikan eMonev sebagai IKU.
- Jumlah satker yang merasa bahwa pengisian data pada eMonev sebagai beban tambahan yaitu 18 satker (35,3%), 32 satker merasa sebagai beban tambahan, dan 1 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi eMonev dari aspek pemantauan kinerja yaitu 42 satker (82,35%), 8 satker tidak merasakan manfaat, dan 1 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi eMonev dari aspek evaluasi kinerja yaitu 38 satker (74,5%), 12 satker tidak merasakan manfaat, dan 1 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi eMonev dari aspek pengendalian kinerja yaitu 39 satker (76,5%), 12 satker tidak merasakan manfaat, dan 1 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasakan bahwa unit eselon 1 pusat lebih banyak menerima manfaat aplikasi eMonev dibanding satker daerah yaitu 38 satker (74,5%), 10 satker menjawab sebaliknya, sedangkan 3 satker tidak menjawab.

Selanjutnya, dari hasil kuesioner tersebut diperoleh juga data kualitatif berupa saran sebagai berikut :

- Perlu ada "peringatan" bagi satker yang tidak menginput data eMonev.
- Perlu ada pemberitahuan kepada satker bila ada versi baru.
- Aplikasi eMonev hanya menambah beban (beban anggaran negara dan beban pekerjaan baru bagi satker).
- Aplikasi yang digunakan sudah cukup bagus, namun satker belum tahu manfaat dari data yang dihasilkan.
- Perlu adanya penjelasan terkait pentingnya aplikasi eMonev.
- Perlu disediakan *help desk* khusus tentang segala permasalahan pada aplikasi eMonev.
- Karena fungsinya sama, sebaiknya digunakan satu aplikasi saja yang dapat

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

diakses oleh semua Kementerian/Lembaga yang membutuhkan.
- Sebaiknya aplikasi eMonev mengambil data langsung dari Kemenkeu.
- Perlu lebih dimaksimalkan terkait laporan keuangan.
- Perlu dibuat agar eMonev lebih *simple* dalam penginputan data.
- Ke depan aplikasi perlu ditingkatkan dalam hal koneksinya dan *load system*nya.
- Ke depan perlu dikondisikan agar *server* tidak sering *down*.
- Perlu ditingkatkan kecepatan aplikasinya.
- Terkadang isian fisik menjadikan realisasi anggaran dan fisik tidak sama. Contohnya capaian fisik sudah selesai namun realisasi anggaran tidak terserap sempurna sehingga hasil akhir tidak sama.
- Data inputan eMonev Bappenas mungkin bisa disinkronkan dengan data dari aplikasi SMART milik Kemenkeu. Dikarenakan hampir ada kemiripan kedua aplikasi tersebut.
- Perlu adanya sosialisasi ulang atau bimbingan teknis terkait penggunaan atau proses input aplikasi.

Jawaban Kuesioner aplikasi SMART

Adapun data dari kuesioner aplikasi SMART sebagai berikut :
- Jumlah satker yang menggunakan aplikasi SMART yaitu 49 satker (96,08%), 2 satker tidak menggunakan karena beban perkerjaan yang tidak seimbang dan lebih sulit memantaunya.
- Jumlah satker yang mengisi data secara rutin pada SMART yaitu 48 satker atau 94,12%, 1 satker tidak rutin merekam, dan 2 satker tidak menggunakan aplikasi.
- Jumlah satker yang menjadikan pengisian data pada SMART sebagai IKU organisasi yaitu 42 satker (82,35%), 6 satker tidak menjadikan pengisian aplikasi SMART sebagai IKU, dan 3 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasa bahwa pengisian data pada SMART sebagai beban tambahan yaitu 13 satker (25,50%), 36 satker merasa bukan sebagai beban, dan 2 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi SMART dari aspek pemantauan kinerja yaitu 44 satker (86,35%), 5 satker belum merasakan manfaatnya, dan 2 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi SMART dari aspek evaluasi kinerja yaitu 47 satker (92,15%), 2 satker belum merasakan manfaatnya, dan 2 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi SMART dari aspek pengendalian kinerja yaitu 44 satker (86,3%), 5 satker belum merasakan manfaatnya, dan 2 satker tidak menjawab.
- Jumlah satker yang merasakan bahwa unit eselon 1 pusat lebih banyak menerima manfaat aplikasi SMART dibanding satker daerah yaitu 40 satker (78,4%), 7 satker menjawab sebaliknya, sedangkan 4 satker tidak menjawab.

Selanjutnya, dari hasil kuesioner tersebut diperoleh juga data kualitatif berupa saran terkait aplikasi SMART sebagai berikut :
- Perlu adanya sosialisasi ulang atau bimbingan teknis terkait penggunaan atau proses input aplikasi.
- Perlu adanya fasilitas *help desk* khusus mengatasi permasalahan.
- Perlu adanya “peringatan” bagi satker yang tidak mengerjakan perekaman SMART.
- Perlu lebih disederhanakan sistemnya (terutama segi *load system* dan *cache*-nya).
- Sangat perlu diteruskan sebagai media pengukuran kinerja.
- Pengisian SMART Kemenkeu dapat terkoneksi secara menyeluruh berdasarkan data *upload* capaian *output* pada aplikasi eRekon - Laporan Keuangan dan OM-SPAN Ditjen Perbendaharaan.

Dari data hasil kuesioner di atas, diperoleh perbandingan hasil kuesioner pada eMonev dan SMART di KPPN Kediri sebagaimana tampak pada tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Kuesioner pada eMonev dan SMART

Materi Kuesioner	eMonev	SMART
Jumlah satker yang menggunakan aplikasi	49 (96,08%)	49 (96,08%)

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

Jumlah satker yang mengisi data secara rutin	47 (92%)	48 (94,12%)
Jumlah satker yang menjadikan pengisian data sebagai IKU organisasi	38 (74,5%)	42 (82,35%)
Jumlah satker yang merasa bahwa pengisian data sebagai beban tambahan	18 (35,3%)	13 (25,50%)
Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi dari aspek pemantauan kinerja	42 (82,35%)	44 (86,35%)
Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi dari aspek evaluasi kinerja	38 (74,5%)	47 (92,15%)
Jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi dari aspek pengendalian kinerja	39 (76,5%)	44 (86,3%)
Jumlah satker yang merasakan bahwa unit eselon 1 pusat lebih banyak menerima manfaat aplikasi Monev belanja K/L dibanding satker daerah	38 (74,5%)	40 (78,4%)

Tabel 3. Komentar Satker terhadap aplikasi eMonev KPPN Kediri

No	Komentar Satker
1	Aplikasi eMonev dirasa menambah beban bagi beberapa satker.
2	Beberapa satker belum mengetahui manfaat dari data eMonev yang dihasilkan
3	Penggunaan aplikasi Monev belanja K/L cukup satu saja.
4	Data eMonev diminta mengambil data dari aplikasi SMART sehingga menjadi lebih sinkron karena terdapat kemiripan aplikasi
5	Aplikasi eMonev perlu lebih *simple* dalam penginputan data
6	Perlu ada "peringatan" bagi satker yang tidak menginput data eMonev
7	Perlu ada pemberitahuan kepada satker bila ada versi baru
8	Perlu adanya penjelasan terkait pentingnya aplikasi eMonev
9	Perlu disediakan *help desk* khusus tentang segala permasalahan

Tabel 4. Komentar Satker terhadap aplikasi SMART KPPN Kediri

No	Komentar Satker
1	Perlu penyederhanaan sistem
2	Perlu adanya "peringatan" bagi satker yang tidak mengerjakan perekaman SMART
3	Perlu adanya fasilitas *help desk*
4	Perlu adanya sosialisasi ulang atau bimbingan teknis terkait penggunaan atau proses input aplikasi

Apabila aplikasi eMonev dan aplikasi SMART diasumsikan sebagai aplikasi yang digunakan dalam Monev belanja K/L, maka dari tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

- Hampir semua satker responden sebagai mitra kerja KPPN Kediri (lebih dari 95%) yang menerima DIPA dari APBN telah menggunakan *tool* aplikasi dalam melakukan Monev belanja K/L.
- Satker tersebut, sebagian besar menjadikan pengisian data Monev belanja K/L sebagai IKU organisasi. Kebijakan pengisian data Monev belanja K/L sebagai IKU organisasi meningkatkan persentase penggunaan *tool* aplikasi Monev di kalangan satker. Pengisian data yang dikaitkan dengan IKU organisasi juga meningkatkan jumlah data yang terkumpul pada unit eselon 1 pusat, sehingga data yang dievaluasi menjadi lebih holistik.
- Sebanyak 35,3% satker merasa bahwa pengisian data aplikasi eMonev sebagai beban kerja tambahan dan 25,5% satker merasa bahwa pengisian data aplikasi SMART sebagai beban tambahan. Karena dirasa menambah beban, hal ini berarti berpotensi meningkatkan ketidaktersediaan data atau berpotensi menurunnya persentase kepatuhan satker dalam pengisian data Monev belanja K/L.
- Walaupun dirasa menambah beban pekerjaan, sekitar 83% satker merasa bahwa aplikasi Monev belanja K/L merasakan manfaat penggunaan aplikasi baik untuk kepentingan pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, maupun pengendalian kinerja. Angka 83% di atas merupakan rata-rata persentase jumlah satker yang merasakan manfaat dari aspek pemantauan kinerja, aspek evaluasi kinerja, dan aspek pengendalian pada aplikasi SMART dan eMonev.
- Sekitar 76% satker merasakan bahwa unit eselon 1 pusat lebih banyak menerima manfaat dari penggunaan aplikasi eMonev

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

dibanding satker daerah. Pada tabel 3 tampak bahwa beberapa satker merasa belum mengetahui manfaat data eMonev. Dengan demikian hal ini berarti bahwa satker menginput data tanpa mengetahui makna dari data yang dihasilkannya.

- Apabila dibandingkan antara tingkat penggunaan aplikasi Monev (di atas 95%) dengan rata-rata tingkat persepsi maanfaat penggunaan aplikasi (sekitar 83%), maka terdapat kesenjangan (*gap*) sekitar 12% yang sudah menginput data Monev belanja K/L, namun tidak merasakan manfaat dari apa yang sudah diinput. Dengan contoh yang lebih ekstrim, pada tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah satker yang merasakan manfaat aplikasi eMonev dari aspek evaluasi kinerja hanya sekitar 74,5%. Hal ini berarti terdapat 25,5% satker yang tidak merasakan manfaat aplikasi eMonev dari aspek evaluasi kinerja. Hal ini menjadi tantangan bagi penyedia aplikasi (Bappenas dan DJA) untuk menyematkan fitur Monev yang lebih dirasakan lagi manfaatnya.

Menurut Marc Robinson, paling tidak terdapat dua cara untuk menjadikan evaluasi lebih berguna dalam proses penganggaran, yaitu (Robinson, 2014):

1) Evaluasi perlu dibuat lebih bermanfaat untuk penganggaran, dengan cara :

- Perlu dibedakan kebutuhan informasi pada unit penganggaran dengan unit pengeluaran (satker).
- Unit penganggaran lebih fokus kepada pengendalian pengeluaran sedang unit pengeluaran / belanja (satker) fokus pada peningkatan belanja (kinerja penyerapan anggaran).
- Pada unit penganggaran, evaluasi fokus digunakan untuk menentukan program mana yang akan dihapuskan atau dikurangi. Bentuk evaluasinya berupa *outcome evaluation*, *program logic analysis* (bentuk evaluasi yang langsung mempertanyakan keberlanjutan keberadaan program dengan memeriksa efektivitasnya).
- Pada unit pengeluaran / satker, evaluasi berperan sebagai sumber pedoman untuk memperbaiki desain program dan pengelolaan program. Bentuk evaluasinya berupa *process evaluations* (dimana lebih fokus pada masalah manajemen daripada masalah anggaran).

2) Proses penganggaran perlu lebih fokus pada kinerja dan prioritas pengeluaran.

Selanjutnya apabila hasil kuesioner terkait aplikasi eMonev dan aplikasi SMART dibandingkan, dapat dianalisis sebagai berikut :

- Satker relatif lebih rutin mengisi data Monev belanja K/L pada aplikasi SMART dibanding aplikasi eMonev. Hal ini dapat terjadi karena lebih banyak jumlah satker yang menjadikan pengisian data SMART sebagai IKU organisasi dibanding aplikasi eMonev. Selain itu, data realisasi anggaran dan capaian *output* pada aplikasi SMART tidak perlu diinput ulang oleh satker, karena data realisasi anggaran pada aplikasi SMART terintegrasi dengan pusat data realisasi anggaran Kemenkeu. Dengan kata lain, data terkait penganggaran dan realisasinya sudah terintegrasi antara Ditjen Anggaran dengan Ditjen Perbendaharaan. Pada aplikasi eMonev, satker diminta untuk mengisi data realisasi anggaran, dimana data realisasi anggaran tersebut sebenarnya sudah ada pada *database* realisasi anggaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia.
- Satker merasa bahwa pengisian data Monev belanja K/L pada aplikasi eMonev lebih menjadi beban tambahan dibandingkan aplikasi SMART. Hal ini karena variasi jumlah data yang diinput pada aplikasi eMonev lebih banyak dari pada jumlah data yang diinput pada aplikasi SMART. Pada tabel 1 tampak bahwa aktivitas satker dalam menginput data aplikasi SMART jauh lebih sederhana dibanding aplikasi eMonev. Variasi data yang diinput pada aplikasi eMonev lebih banyak dibanding pada SMART.
- Rata-rata sekitar 12% satker mempunyai persepsi tidak merasakan manfaat Monev belanja pada aplikasi SMART dan 22,2% satker mempunyai persepsi tidak merasakan manfaat Monev belanja pada aplikasi eMonev. Hal ini berarti bahwa satker lebih merasakan manfaat aplikasi

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

SMART dibanding aplikasi eMonev. Rata-rata sekitar 88% satker menyatakan merasakan manfaat aplikasi SMART dibanding 77,8% satker yang merasakan manfaat aplikasi eMonev baik dari sisi aspek pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan pengendalian kinerja.

- Aplikasi SMART dirasakan relatif lebih bermanfaat bagi unit eselon 1 pusat dibandingkan manfaatnya bagi satker daerah.
- Satker merasakan bahwa terdapat kesamaan data yang diinput pada aplikasi eMonev dengan aplikasi SMART. Mengingat adanya kesamaan tersebut, maka terdapat usulan agar isian data eMonev dapat diambil dari data aplikasi SMART atau penggunaan aplikasi Monev belanja K/L cukup dilakukan oleh satu pihak saja sehingga satker tidak perlu menginput data pada dua aplikasi yang berbeda.
- Aplikasi eMonev lebih banyak mendapat komentar berupa kritikan dan masukan perbaikan dibanding aplikasi SMART.

Bila dikaitkan dengan teori pada *Model for Mandatory Use of Software Technologies*, maka terdapat kesamaan topik terkait manfaat atau dampak yang dihasilkan oleh keberhasilan sistem aplikasi. Manfaat penggunaan aplikasi merupakan salah satu variabel yang diukur dalam menilai keberhasilan sistem aplikasi. Perbedaan metode pada penelitian ini dengan metode MMUST terletak pada *user* atau pengguna aplikasi yang menjadi objek survei penelitiannya. Pengguna aplikasi Monev belanja K/L dibedakan atas unit eselon 1 pusat dan satker daerah, dimana satker daerah cenderung diposisikan lebih kepada penginput data. Setelah data diinput oleh satker daerah dan terkumpul di pusat, maka (berdasarkan hasil kuesioner) unit eselon 1 pusat lah yang cenderung menikmati pengolahan data Monev dimaksud.

Pada penelitian tentang keberhasilan sistem aplikasi dengan metode MMUST, satker pengguna tidak dibedakan atas unit eselon 1 pusat dan unit/satker daerah. Pada topik terkait manfaat Monev belanja K/L, metode MMUST cenderung lebih cocok dengan menjadikan pengguna unit eselon 1 pusat sebagai objek survei penelitian, karena unit eselon 1 pusat berperan sebagai pengambil kebijakan dan kebijakan diambil berdasarkan hasil Monev yang ada. Kebijakan cenderung berlaku umum pada lingkup nasional sehingga dibutuhkan data Monev belanja pada level nasional, bukan pada level regional.

Studi empiris terkait Monev belanja K/L pernah dilakukan oleh Bank Dunia yang dipublikasikan melalui artikel yang berjudul *Using M&E to Support Performance Based Planning and Budgeting in Indonesia* (Ahern et al, 2012). Menurut Bank Dunia, sistem Monev lebih menekankan pada pemantauan daripada evaluasi. Tantangan pelaksanaan Monev belanja K/L antara lain adalah banyaknya aktor yang terlibat, yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator, dan K/L. Koordinasi proses perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, sementara K/L memiliki peran aktif dalam eksekusi program /kegiatan. Baik Bappenas, Kementerian Keuangan, maupun K/L telah mengembangkan sendiri proses Monev belanja K/L untuk memenuhi kebutuhan terhadap informasi. Tantangan yang lain berupa terdapatnya peraturan yang tumpang tindih untuk mengumpulkan data dari K/L dan instansi di bawahnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas data, beban pelaporan, permintaan informasi yang berlebihan, kesenjangan informasi, akses ke informasi, dan koordinasi kebijakan Monev belanja K/L secara keseluruhan.

Di lain pihak, K/L diharuskan untuk menyediakan beberapa laporan monitoring kepada Kementerian Koordinator. Masing-masing K/L memiliki sistem monitoring internal untuk mengumpulkan informasi terkait pengeluaran anggaran dan implementasi program. Setiap K/L memiliki format pelaporan unik berdasarkan sistem pemantauan internal program tertentu. Biaya untuk menyusun dan mengelola laporan rutin menjadi semakin meningkat.

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Vol.5, No.2, (2021), Hal. 136-153

4. SIMPULAN

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat Monev belanja K/L dan untuk mengetahui persepsi satuan kerja terhadap manfaat Monev belanja K/L pada satker-satker mitra kerja KPPN Kediri. Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Secara umum, manfaat Monev belanja K/L yaitu memberikan masukan (*feed back*) dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan untuk peningkatan/perbaikan kinerja. Manfaat berupa *feed back* tersebut berlaku baik untuk unit eselon 1 pusat maupun untuk seluruh satker yang menerima alokasi belanja dari K/L (APBN). Namun satker-satker daerah merasakan bahwa manfaat tersebut lebih banyak dinikmati oleh unit eselon 1 pusat.
2) Adapun persepsi satker-satker mitra kerja KPPN Kediri terhadap Monev belanja K/L yaitu :

- Sekitar 35,3% satker mempunyai persepsi bahwa pengisian data Monev belanja K/L (pada aplikasi eMonev) sebagai beban kerja tambahan.
- Pada aplikasi SMART, sekitar 25,5% satker mempunyai persepsi bahwa pengisian data Monev belanja K/L (pada aplikasi SMART) sebagai beban tambahan.
- Selain persepsi terkait tambahan beban pekerjaan, sebesar 74,5% satker merasakan bahwa unit eselon 1 pusat lebih banyak menerima manfaat aplikasi eMonev dibanding satker daerah.
- Selanjutnya sekitar 78,4% satker merasakan bahwa unit eselon 1 pusat lebih banyak menerima manfaat aplikasi SMART dibanding satker daerah.
- Sekitar 22,2% satker mempunyai persepsi tidak merasakan manfaat Monev belanja pada aplikasi eMonev baik dari sisi aspek pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan pengendalian kinerja.
- Sekitar 12% satker mempunyai persepsi tidak merasakan manfaat Monev belanja pada aplikasi SMART baik dari sisi aspek pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan pengendalian kinerja.

5. SARAN/REKOMENDASI

Satker tidak sepenuhnya merasakan manfaat Monev belanja K/L. Oleh karena itu, saran yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- Untuk meningkatkan persepsi manfaat Monev belanja K/L, maka perlu dibedakan kebutuhan informasi untuk unit eselon 1 pusat dengan kebutuhan informasi untuk satker daerah pada aplikasi SMART dan eMonev.
- Unit eselon 1 pusat (dalam hal ini sebagai entitas perencana anggaran) fokus pada pengendalian pengeluaran sedangkan satker daerah fokus pada monitoring dan evaluasi peningkatan belanja (kinerja penyerapan anggaran). Dengan demikian, perlu ada fitur terkait pengendalian belanja pada aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh unit eselon 1 pusat dan fitur terkait monitoring/evaluasi kinerja penyerapan anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh satker daerah.
- Bentuk evaluasi pada unit eselon 1 pusat lebih ke arah *outcome evaluations* dan program *logic analysis*, sedangkan bentuk evaluasi pada satker daerah lebih ke arah *process evaluations*.
- Perlu adanya penyederhanaan data yang perlu diinput khususnya pada aplikasi eMonev.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ahern, M., Beard, V.A., Gueorguieva, A.I., Handini, R.S. (2012). *Using M&E to Support Performance Based Planning and Budgeting in Indonesia*. The World Bank PREM Notes.

Casley, D.J.; Kumar, K. (1987). *Project Monitoring and Evaluation in Agriculture*. The International Bank for Reconstruction and Development. Washington, D.C.

Koh, Chang E.; Prybutok, Victor R.; Ryan, Sherry D.; Wu, Yu “Andy”. (2010). A Model for Mandatory Use of Software Technologies: An Integrative Approach by Applying Multiple Levels

of Abstraction of Informing Science. *Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline*. Volume 13.

Mackay, K. (2010). Conceptual Framework for Monitoring and Evaluation. *The World Bank PREM notes*.

Robinson, M. (2014). Connecting Evaluation and Budgeting. *Independent Evaluation Group* (World Bank).

Rubio, G. M. (2011). *The Design and Implementation of a Menu of Evaluations*. World Bank.

Santoso, Timotius Wisnugroho.; Tanaamah, Andeka Rocky.; Sitokdana, Melkior N. N. (2017). Analisis Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Dengan Menggunakan Kerangka Model for Mandatory Use of Software Technologies pada Aplikasi Sistem Keuangan dan Akuntansi Satya Wacana (SIKASA) di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

SMERU. 2011. Monitoring and Evaluation of Development Programs in Five Ministries: A Study on the System of Implementation. Jakarta, Indonesia.

Sugiyono. (20019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta, Bandung.

Suliantoro, I. (2020). Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 16-30.